KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi
Volume 7, Nomor 2, Desember 2023: 290 - 307
kabanti.antropologi@uho.ac.id

ISSN: 2622-8750 (Cetak)
ISSN: 2503-3468 (Online)

BARRIER ASESSMENT DALAM MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL PADA KOMUNITAS DIFABEL DI DESA PLANJAN SAPTOSARI GUNUNG KIDUL

Siti Aminah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail Kerenspodensi: siti.aminah@uin-suka.ac.id

Abstract

Tulisan ini hendak melihat realita lingkungan Desa Planjan saat ini setelah 2018 dan 2019 dengan penerjunan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk melihat keeberlanjutan yang terjadi di Desa Planjan. Adanya hambatan yang menyebabkan lingkungan inklusif susah dicapai. Asesment hambatan ini penting dilakukan sebagai awal untuk melangkah menuju aksesiilitas.. Dengan wawancara kepada penyandang disabilitas, apparat desa dan tokoh masyarakat di Desa Planjan, peneliti mencoba menggali hambatan terciptanya lingkungan inklsi dan solusi atau tawaran untuk mengatasi hambatan di Desa Planjan. Dari data tahun 2018 dijelaskan bahwa kecamatan Saptosasi merupakan kecamatan terbanyak jumlah penyandang Disabilitasnya.. Penyanang disabilitas tersebut tersebar di berbagai Desa, salah satu desa terbanyak jumlah penyandang Disabilitasny adalah Desa Planjan. Hal ini menjadi dasar penelitian berbasis pengabdian masyarakat ini dilkaukan dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif. Hasilnya menggambarkan hambatan inlusi social melalui FGD dengan tokoh, warga difabel, apparat desa,menggambarkan bahwa terdapat hambatan aksesibilitas fisik maupun non fisik. Sedangkan upaya mengatasi hambatan tersebut engan adanya sosialisasi atau penyadaran awal sebagai embrio munculnya kesadaran lingkungan yang inklusif.

***Kata Kunci**: Inklusi social, Hambatan, ,Desa Inklusi.*

PENDAHULUAN

Konvensi Internasional mengenai Hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) yang diratifikasi oleh Indonesia dan tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara. Menerima perbedaan dan keberagaman dengan positif merupakan seuatu sikap inklusif. Secara spesifik, pasal 9 UU Pengesahan CRPD atau No. 9 tahun 2011 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak mendapatan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangatlah penting guna mendukung kemandirian dan partsipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.[1]

Partisipasi difabel bisa dimediasi dengan suatu kebiajkan yang pro-lingkungan inklusif. Salah satu lingkungan yang paling memungkinkan untuk memulai gerakan ini yakni tingkat desa. Desa inklusif yakni desa yang menyediakan akses layanan baik fisik maupun non fisik untuk semua masyarakat. Jika dilihat dari bangunan dan akses di Desa Planajn, kami masih menemukan kondisi yang perlu dkaji, baik kondisi fisik bangunan ataupun layanan yang terintegrasi dengan konsep inklusi social. Planjan merupaakndesa di Kecamatan Saprosari yang memiliki jumlah difabel menonjol yakni sejumlah 229 (56%)[2].

Tahun 2019 pendampingan KKN Tematik Inklusi dilakukan di 3 (tiga) dusun yakni Pucung, Planjan dan Ngalang Alangsari dan data yang kami dapatkan bahwa di 3 dusun ini terdapat 28 Difabel dengan jenis beragam. Hasil assessment kebutuhan dan program untuk mengadvokasi isu inklusi social kami mulai dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul, SIGAB

Jogjakarta dan Alumni Difabel yang pernah kuliah. [3] seperti dipublikasikan oleh media social Desa Planjan dan HUMAS UIN Sunan Kalijaga :



Dari pemaparan di atas, sebenanya isu lingkungan social yang inklusif sudah mulai diadvokasikan oleh KKN Tematik Didabel UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 dengan menggandeng DPL KKN, Dinas Sosial, SIGAB, komunitas Difabel, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa. Bahkan program sabtu inklusi, dan penyadaran inklusi telah menjadi keunggulan dari KKN ini.

Maka, penelitian ini akan melakukan advokasi lanjutan dengan mengetahui *barrier* / hambatan dalam mewujudkan inklusi social di lingkungan yang banyak jumlah difabelnya, ketika sudah diketahui tantangannya, akan diadakan advokasi lanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif.

METODELOGI

Penelitian yang akan dilakukan berbasis PAR, sebagai metodoliginya akan dilakukan pendekatan PAR. *Participatory Action Research* merupakan metode penelitian aksi partisipatoris, yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi hambatan lingkungan inklusif yang menjadi rumusan masalah penelitian. Data awal akan dilakukan melalui partisipasi penuh berdasarkan kebutuhan dari subyek yang akan diteliti yakni masyarkat difabel yang ada di wilayah Planjan dan masyarakat sekitar Planjan.[11] Hasil akhir dari

penelitian ini adalah adanya perubahan bagi difabel yang ada di Planjan, sebagai tindak lanjut akan adanya aksi yang dilakukan sebagai bentuk rekomendasi penelitian ini. Penelitian ini menarik, mengingat jumlah difabel yang berada di Desa Planjan merupakan jumlah terbesar dan setelah dilakukan gerakan awal pada tahun 2019 melalui KKN dengan menggendeng SIGAB, Dinsos Gunung Kidul maka sampai saat ini telah terbentuk Group/KOmunitas Difabel di Dusun Pucung Khususnya.

Pada penelitian PAR, peneliti adalah menjadi fasilitator yang mencoba melibatkan Difabel dan lingkungannya menggali bersama-sama mengenai isu apa yang penting untuk diteliti berkaitan dengan Inklusi Sosial dan hambatannya dalam mewujudkan lingkungan desa yang inklusif.

Isu inklusi sosial digali dan dikaji bersama dengan masyarakat difabel sebagai bentuk penyadaran dan sebagai bahan untuk nantinya ditindaklanjuti dengan merencanakan bersama dengan pemerintah, sehingga dalam penelitian ini masyarakat bersama peneliti melakukan kegiatan FGD yang menumbuhkan isu-isu kebijakan yang pro komunitas yang termarginalkan.

Lokasi penelitian ini focus pada dusun yang telah menjadi lokasi KKN injlusi sebelumnya yakni tahun 2018 dan 2019, yakni dusun Pucung, ngalang ngalangsari dan Planjan. Hambatan digali dan mencari solusi bersama-sama. Penelitian ini diyakini sangat bermanfaat sekaligus sangat manusiawi. Sangat bermanfaat karena masyarakat subyeklah yang lebih mengetahui problem apa yang ada di sekitar mereka, problem apa yang penting untuk digali dan didalami serta dicari solusinya. Sedangkan peneliti 'hanya' lah *outsider* yang belum tentu mengetahui dengan baik dan akurat mengenai problem di sekitar subyek penelitian. Penelitian PAR dianggap lebih manusiawi, karena subyek dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukan sekedar informan dan responden yang diambil datanya untuk dimanfaatkan sebagai data yang 'mati'. Subyek adalah agen yang aktif yang dilibatkan dalam proses penelitian bahkan dilibatkan dalam membawa perubahan di masyarakatnya setelah penelitian selesai dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Term asesmen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *assessment* yang berarti penilaian suatu keadaan. Penilaian yang dimaksud berbeda dengan evaluasi. Jika evaluasi dilaksanakan setelah anak itu belajar dan bertujuan untuk menilai keberhasilan anak dalam mengikuti pelajaran, maka asesmen tidak demikian.

Dalam asesmen penilaian dilakukan pada saat anak sebelum diberikan pelajaran, atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa ia diperkirakan mengalami hambatan dan kesulitan dalam belajar, dan/atau sementara belajar untuk menentukan program selanjutnya (N. Dede Khoeriah). Sejalan dengan itu, Lerner, (1988) mendefinisikan asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. *Assessment refers to the gathering of relevant information to help an individual make decisions. Assessment in educational settings is a multipaceted process that involves for more than the administration of a test.* (Mulliken & Buckely (1983) dalam Benner (1992).

Uraian di atas jelaslah bahwa asesmen merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang relevan guna memahami atau menentukan keadaan individu. Tujuan utama dari suatu asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan seb agai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan salah satu dari tiga aktivitas evaluasi pendidikan. Ketiga aktivitas tersebut adalah (1) asesmen, (2) diagnostik, dan (3) preskriptif (Hargrove dan Poteet, 1984 dalam Abdurrahman, 2009), Dengan demikian, asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosis, dan berdasarkan diagnosis tersebut dibuat preskripsi. Meskipun asesmen pertama kali dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, asesmen sesungguhnya berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Untuk memperoleh informasi asesmen (assessment information) dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, pengukuran informal, dan tes baku formal. Asesmen bukan pula tes, akan tetapi tes merupakan bagian dari asesmen Berbagai metode pengumpulan informasi tersebut hendaknya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi secara simultan.

Asesmen tidak bertujuan menentukan penyebab, memberi label penyandang cacat, atau menetapkan jenis remediasi/penanganan berdasarkan label tersebut. Jika seorang pesertadidik berkebutuhan khusus mendapat label, misalnya autis, label ini bukan merupakan indikasi penyebab kesulitan belajarnya, tetapi sekedar untuk membuat dokumentasi tentang jenis layanan pendidikan yang diperlukan. Hasil asesmen akan menjadi bahan masukan dalam menyusun program khusus bagi peserta didik berdasarkan jenis ketrampilan yang belum dikuasai oleh pesertadidik tersebut.

Dengan demikian, asesemen hambatan dimaksudkan bahwa setelah dilakukan usaha penghimpunan informasi terkait kondisi di lapangan tentang bagaimana persepsi pemberdayaan difabel di desa Planjan terdapat beberapa hambatan atau kesulitan, antara lain:

Sementara kebutuhan lingkungan inklusif bisa didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya pendataan yang jelas mengenai jumlah dan jenis Difabel yang ada di Desa Planjan dengan mengajak diskusi langsung dengan masyarakat setempat, mulai dari difabel, keluarga difabel, tokoh masyarakat dan llain sebagainya. Pemutakhiran ini sagatlah penting untuk memulai segala Tindakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta potensi difabel di Desa ini. Beirkut data Difabel dari dokumen peneliti sejak menjadi DPL KKN tahun 2018.

Dari 14 Dusun yang ada di DEsa PLanjan, peneliti baru mendapatkan data awal 7 dusun, mengingat tematik inklusi sejak 2018 diterapkan hanya di 3 dusun . Adapun lokasi lainnya lebih pada tema potensi local yakni tembaga dan lain sebagainya.

Untuk menggali hambatan yang ada di Desa Planjan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif atau lingkungan yang inklusif, peneliti melakukan wawancara langsung serta observasi pada bulan November 2021 dengan perwakilan difabel yaitu bapak Nardi di dusun Ngalang ngalangsari serta dengan penjabat kelurahan dan FGD dengan beberapa dukuh. Jika diilhat dari realitanya sesuai pemaparan hasil wawancara, terdapat dua hambatan yang dialami difabel maupun lingkungan Desa Planjan yakni sebagai berikut:

1. Hambatan Fisik

Untuk mengetahui tantangan mewujudkan lingkungan yang inklusi peneliti bersama tim melakukan observasi dan wawancara terkait apa saja yang telah dilakukan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 setelah pendampingan dari UIN sunan Kalijaga ternyata mengalami hambatan karena danya pandemic.. Seperti yang kita ketahui pada website desa planjan saptosari Gunungkidul pada tahun 2018 dan tahun 2019 program KKN tematik ditempatkan di desa ini. [1]

[1] http://pmi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1042/kkn-tematik-uin-sunan-kalijaga-sosialisasikan-lingkungan-inklusi



Selain berita di atas, solider juga menarasikan kegiatan penyadaran lingkungan inklusi di Desa Plajan Ketika terbentuknya DPO di dusun Pucung Planjan Saptosari .[2]



Salah satu kutipan dari berita di atas adalah ;

" Merespon kondisi tersebut, KKN UIN membuat beberapa kegiatan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya memahami difabel. Salah satunya membentuk organisasi difabel yang berada di Planjan. Pembentukan organisasi tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas serta menjadi ruang

[2] https://www.solider.id/baca/5405-organisasi-difabel-desa-kehendak-mengubah-nasib

koordinasi mengawal kebijakan-kebijakan desa.

Melalui organisasi mereka dapat berdiskusi dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya berserikat dan berkumpul, melatih untuk berani dalam menyampaikan pendapat, mengorganisir orang lain, dan yang lebih penting lagi adalah mengadvokasi difabel agar mendapatkan hak yang sama.

Dalam organisasi tersebut KKN UIN memberikan pendidikan mengenai hak-hak yang harus dimiliki difabel. Sebagai permulaan, pemberian motivasi kepada difabel agar berani dan berkarya, serta menguatkan mereka agar saling peduli dengan yang lainnya."

Dua tahun dilakukan pendataan dan pemetaan baik itu potensi ataupun realita yang dihadapi oleh difabel di tiga dusun khususnya yakni planjan , ngalang ngalang Sari dan dusun Pucung. Seperti yang telah dipaparkan dalam website yang menjelaskan bahwa berbagai macam program dan temuan yang ditemukan oleh para mahasiswa difabel yang sedang ber KKN di sana itu semestinya menjadi rujukan desa untuk bisa memulai mewujudkan lingkungan yang inklusif.

Maka peneliti menggali informasi ketika tahun 2020 dan 2021 ini tidak dilakukan pendampingan karena adanya pandemic. Sejauh mana hambatan yang dirasakan oleh perangkat desa, warga difabel dan juga keluarga difabel.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu perangkat desa yang bernama bapak Budi: [3]

"kami merasa bangga ketika pada tahun ini ada berbagai macam sentuhan dari pemerintah daerah gunung kidul khususnya dengan adanya Perda yang memulai gerakan untuk terciptanya desa kami sebagai desa yang ramah terhadap warganya khususnya difabel. Bu Aminah bisa melihat sendiri berbagai foto kegiatan ketika pemerintah daerah mencoba mensosialisasikan Perda tersebut di balai desa lanjan ini.

Pak Budi juga menjelaskan bahwa berbagai macam tantangan adalah belum adanya kekuatan ataupun paguyuban yang dibentuk oleh warga masyarakat khususnya untuk mengetahui kebutuhan ataupun problem dari warga difable, bersyukur sekali ketika KKN dari UIN sunan Kalijaga telah memulainya dan ini selalu kami sebutkan ketika ada program yang berkaitan erat dengan isu inklusi bahwa UIN yang telah mendampingi dan memulainya.

Menurut Pak Budi tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan lingkungan inklusi dari segi aksesibilitas fisik, bisa dilihat dari bangunan balai

[3] Wawancara dengan bapak Budi (Carik Desa Planjan), pada hari kamis, 16 Desember 2021 di Ruang Balai Desa Planjan Saptosari Gunung Kidul.

desa untuk menuju pintu ataupun teras terdapat tangga tangga yang curam dan ini sangat membahayakan difabel baik itu yang netral ataupun yang daksa. Pihak desa mengakui kedepannya akan menjadi perhatian untuk akses fisik ini mengingat dari warga yang ada di planjan ini banyak diantaranya yang memiliki keadaan ataupun kondisi hambatan dalam hal akses sibilitas fisiknya. Berikut hasil observasi dan gambar bangunan balai desa Planjan:[4]

Nama Bangunan fisik	Aksesibilitas	
	Hasil Penilaian	Keterangan
1) JALAN	Tidak aksesibel	Belum ada :marka jalan/ rambu-rambu, guiding block, parkir yang aksesibel, pedestrian.
2) Balai Desa Planjan	Tidak Aksesibel	Masih dikelillingi tangga (akses untuk kursi roda belum ada), akses menuju ruangan dan kantor desa kurang ramah untuk difabel.
3) Tempat Ibadah	Tidak Aksesibel	Masih dikelillingi tangga (akses untuk kursi roda belum ada), akses masuk menjid desa kurang ramah untuk difabel.
4) Aula	Tidak Aksesibel	Masih dikelillingi tangga (akses untuk kursi roda belum ada), akses naik ke aula kurang ramah untuk difabel.
5) SD	Tidak Aksesibel	Belum ada : guiding block, parkir yang aksesibel, pedestrian.

2. Hambatan Non Fisik

[4] Observasi lingkungan atau aksesibilitas fisik bangunan Desa Planjan, dilakukan pada hari kamis, 16 Desember 2021

Untuk terciptanya lingkungan yang ramah terhadap warganya khsuusnya yang memiliki keterbatasan akses pada fasilitas umum , baik fasilitas desa, fasilitas sekolah maupun tempat ibadah, diperlukan pemahaman yang benar tentang hambatan yang ada dari perspektif warga difabel. Maka desa Planjan memiliki beberapa pemahman terkait hambatan yang ada di lingkungannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 2 warga di ngalang-ngalang sari dan pak Dukuh Pucung dijelaskan dalam narasi di bawah ini.

a. Hambatan personal dari difabel

Banyak warga difabel yang masih ragu dan jarang mengakses layanan yang ada di balai desa ataupun layanan di ruang publik lainnya di sekitar desa planjan kecamatan saptosari Gunungkidul. Pernyataan ini dijelaskan oleh seorang difabel daksa yang bernama bapak N. beliau sangat tidak biasa untuk keluar ataupun bergaul berinteraksi dengan sesama warga dan difabel lainnya mengingat aksesibilitas yang ada pada dirinya maupun lingkungan sangat tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini yang menjelaskan seorang difabel daksa tidak akan mudah untuk berinteraksi secara personal mengingat kemampuannya untuk berjalan ataupun menggunakan kendaraan tidaklah didapatkannya.



Bapak N ini sangat potensial untuk menjadi pemimpin di kalangan warga yang difabel, beliau sehari-hari semangat mengaktualisasikan potensinya untuk emmbuat kendang burung dan dipasarkannya. Secara personal bapak ini memiliki potensi kuat dan

bisa memobilisasi warga, salah satu obrolan yang sangat mendukung keberadaannya yakni keinginan beliau agar bisa didengar oleh lingkungannya atau pemerintah bahwa difabel di sini utuh wadah.
Berbeda dengan bapak N., ada beberapa pribadi difabel yang merasa minder dan malu jika harus bersuara, pandangan bahwa aka nada dampak yang kurang nyaman Ketika mereka memiliki suara untuk mempublikasikan apa yang mereka harapkan atau inginnkan untuk kemjauan personal dan potensi mereka.

b. Hambatan dari keluarga difabel

Menurut pengakuan dari salah satu tokoh yang ada di dusun Pucung mengatakan bahwa jangankan yang di fabel yang tidak dipublish ajang untuk sekolah tinggi itu sangatlah tidak semangat mengingat pekerjaan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini bisa segera dilakukan tanpa harus bersekolah tinggi ini yang menjadi dasar mengapa tantangan menciptakan lingkungan yang kondusif yang ramah terhadap semua warga itu menjadi titik tolak bagaimana pentingnya keluarga untuk bisa maju Bersama.

Keluarga terdapat beberapa keluarga yang mendukung adanya kemajuan untuk keluarganya yang di fabel misalnya terdapat dalam gambar ini beliau adalah seorang ibu yang selalu mengantar jemput putranya yang sekolah di SLB dan jaraknya jauh, beliau mampu menyemangati putranya untuk bisa beraktivitas dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya hal ini dilakukan untuk menciptakan agar anaknya tersebut tidak ketinggalan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan





c. Hambatan dari lingkungan difabel dan kebijakan

Lingkungan yang dimaksud adalah instansi pendidikan

instansi kesehatan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan mulai dari dusun desa sampai pada pemerintah daerah belum secara jelas mengungkapkan tentang keberadaan penyandang disabilitas yang ada di desa serta mengakomodasi semua keperluan dan aksesibilitas untuk terciptanya keberlangsungan hidup mereka.

B.Advokasi mengurangi hambatan

Dari penjelasan di atas bisa dipetakan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan lingkungn yang innklusif adalah:

1. Pelibatan warga, Pembangunan yang baik menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 adalah pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk penyandang disabilitas sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan bersama.
2. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Indikator kota/desa inklusi dapat dipahami sebagai adanya partisipasi penuh difabel, adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel, terjaminnya aksesibilitas serta adanya sikap inklusif warga desa. Keempat indikator itulah yang menjadi dasar penyusunan program kerja Pemda sampai Desa Planjan, Saptosari, Gunungkidul.
3. Mengurangi hambatan dengan pengaruhi kebijakan di Gunung Kidul, lahirnya perda Penyandang Disabilitas Tahun 2021 yang disosialisasikan kepada apparat Desa Planjan sebagai upaya untuk mensinergikan tantangan dengan SDM yang ada agar tercapai lingkungan inklusif.





Bisa dilihat bahwa Desa Planjan telah melakukan kegiatan sosialisasi UU nomor 09 tahun 2016 dengan bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemegang kebijakan. Ini merupakan upaya untuk menciptakan kesadaran dan peningkatan kapasitas SDM yang ada di Planjan.

Menurut pengakuan pak Budi sebagai Sekretaris Desa Planjan, kegiatan ini didukung oleh keinginan dan motivasi semuanya untk merangkul warga difabel, pemegang kebijakan mulai melirik Planjan untuk nersinergi mewujudkannya.

4. Pemberntukan DPO atau organisasi Difabel tingkat Desa, dengan jumlah Difabel yang ada di PLanjan, menjadi kekuatan penting untuk mengmpulkan energi bersama. Khsuusnya warga difabel pernah membuat komunitas ini di dusun Pucung dengan melibatkan PLD UIN Sunan Kalijaga untk berdiskusi dan FGD.

Menurut bapak N sebagai seorang Difabel, dirinya sangat menginginkan merangkul teman-temannya untuk bisa saling menyapa, berinter aksi social dan membuat kekuatan bersama, namun beliau sangat prihatin karena belum ada moda transportasi yang mendukungnya untuk bisa keluar rumah secara mandiri. Motor roda tiga menjadi harapan baginya untuk segera bisa dimiliki agar bisa bersilaturahmi pada warga difabel lainnya sebagai embrio memunculkan organisasi difabel tingkat desa.

Berikut inti dari tantangan dan tawaran untuk kedepannya dalam mewujudkan lingkungan social inklusi:[5]

[5] Hasil wawancara dan observasi peneliti sejak 2019 dan 2021

INTERNAL DIFABEL	- **Penerimaan personal dan keluarga** - **Merasa kurang teman yang mendukung** - **Tidak berorientasi maju** - **Khawatir aksinya menjadi boomerang bagi dirinya**
EKTERNAL / LINGKUNGAN	- Beberapa warga masih berorientasi pada hasil jangka pendek - Kurangnya semangat bersekolah/ berprestasi di lingkungan masyarakat - Pengakuan yang kurang atas potensi difabel - Belum adanya Paguyuban difabel yang kuat - Akses berdemokrasi terbatas
AKSESIBILITAS	- Layanan pemerintah: Dusun, Desa, Kesehatan, Pendidikan baik secara fisik ataupun non-fisik kurang ramah terhadap difabel - Perda yang kuat mewujudkan aksesibilitas

INTERNAL DIFABEL	- **MOTIVASI DARI SAHABAT INKLUSI UNTUK TERLIBAT DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT** - **PELIBATAN LPPM –KKN UNTUK INTERVENSI PERSONAL DIFABEL**
EKTERNAL / LINGKUNGAN	- SINERGI PEMERINTAH DESA-DUSUN-WARGA DIFABEL DAN MASYARAKAT UMUM - PENGUATAN KERJASAMA DENGAN LSM SIGAB-PEMDA DAN FORUM CSR - PEMBERDAYAAN DAN PENYADRAN LINGKUNGAN PLANJAN DENGAN

	AKSI NYATA ; missal peringatan HDI 2022 dan live in Advokasi hak-hak Penyandang Disabilitas
AKSESIBILITAS	- Gerakan Layanan pemerintah: Dusun, Desa, Kesehatan, Pendidikan baik secara fisik ataupun non-fisik untuk ramah terhadap difabel - Perda yang kuat mewujudkan aksesibilitas; Perda Kab. Gunung Kidul tentang Penyandang Disabilitas

KESIMPULAN

- Desa Planjan menjadi salah satu yang memilliki warga difabel banyak di kecamatan Saptosari. Sehingga sejak 2018 telah melakukan Kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga khsususnya untuk memetakan data dan potensi warganya
- Dari tiga dusun yang dilaksanakan KKN UIN terdapat 20 orang difabel. Salah satu dusun yang memiliki potensi difabel daksa yang aktif yakni dusun ngalang ngalangsari, sedangkan dusun Pucung menjadi embrio adanya DPO atau organisasi difabel yang akan menguatkan terciptanya isu inklusi.
- Hambatan menciptakan lingkungan yang inklusi salah satunya karena usia warga difael, Usia mereka sangat variatif, dari usia sekolah sampai orang dewasa dengan jenis disabilitas yang beragam. Ada yang sejak lahir, ada pula karena sebuah kecelakaan, juga ada karena mereka sudah lanjut usia. Dimana, hambatan aksesibilitas baik yang secara fisik maupun non fisik masih ditemukan di des aini. Hambatan personal, keluarga, lingkungan serta kebijakan perlu menjadi catatan penting bagi riset kedepannya agar hamabtan ini bisa diminimalisir dan dicarikan solusi terbaik.

- Upaya meminimalisir hambatan yang ada dengan melakukan advokasi melalui pendampingan sikap terbuka. Hal tersebut diberikan agar difabel berani untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah yang dialaminya selama ini. Sosialisasi UU penyandag disabilitas dilakukan Desa agar tercipta kesafaran dan kapasitas SDM yang mampu sadar dan bersikap inklusif
- Terbentuknya DPO dusun Pucung Desa Planjan Saptosari tahun 2019 dan menyebarnya virus ini untuk membentuk DPO tingkat Desa agar kuatsesuai indicator desa inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Astri Hanjarwati, Siti Aminah, Jamil S, *"EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PENDIDIKAN INKLUSI"*, Journal of Disability Studies INKLUSI Vol. 1., No.2., tahun 2014

Dayinta Galih Jalanidhi, Identifikasi Hambatan-hambatan Guru Dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusif SD Negeri 2 Petir Piyungan Bantul, *Jurnal Widia Ortodidaktika*, Vol. 6, No. 8, Tahun 2017.

Don K Marut, *Riset Aksi Partisipatoris: Riset Pemberdayaan dan Pembebasan*. (Yogyakarta: Insist Press, 2004).

Jamil Suprihatiningrum, Astri Hanjarwati, Siti Aminah, "Persepsi Penyandang Disabilitas dan stakeholder untuk mmepromosikan dan mengembangkan komunitas inklusif di DIY dan Sulawesi Tenggara", Jurnal Sosiologi Reflektif 13 (2)

Pasal 9 UU Pengesahan CRPD atau Undang-undang No. 9 tahun 2011

Moh. Soehada, *Panduan Program Pengabdian/KKN Tematik Among Tani Dagang Layar Kecamatan Saptosari Gunung Kidul*, LPPM UIN Suka, 2018.

Ratih Probosiwi, Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 3, Desember 2017

Siti Aminah, Jamil Suprihatiningrum, Astri Hanjarwati, *"PRODADISA "Program Pemberdayaan Difabel Daksa" menuju Percontohan BKD (Balai Kerja Difabel) untuk Meningkatkan Kemandirian dan Life Skill Difabel", Journal of Disability Studies INKLUSI terbitan 2, jilid 2, tahun 2015.*

Siti Aminah, dkk., *Survey Aksesibilitas Fisik dan Sosial dalam Penyususnan Grand Design Desa Inklusi di Desa Trumrti Srandakan Bantul,* hibah Penelitian DIKTIS tahun 2018

Robin MC Taggard, *Action Research: A Short Modern History,* (Victoria: Deakin University, 1991).

Walter Fernandes dan Rajesh Tandon, *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan,*
(Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993)

Observasi peneliti saat pendampingan KKN pada tanggal 25 Juli 2019 di Balai Desa Planjan Saptosari Gunung Kidul.